LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN JUNI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Rabu, 9 Juli 2025

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 51,83 %

b. Keuangan = 8.898.843.730 (46,52%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.362.000			29.528.500		
1	Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan dan kinerja OPD	46.362.000	69,67	63,68	29.528.500	(5,99)	perjadin menyesuaikan kebutuhan (undangan)
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	35.277.000			11.077.500		
1	Pelayanan Informasi	20.727.000	2,40	1,20	300.000	(1,20)	
2	Konsultasi dan Koordinasi	14.550.000	52,07	47,69	10.777.500	(4,38)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.200.000			8.701.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	36.200.000	39,80	24,04	8.701.000	(15,76)	menyesuaikan kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	128.327.000			40.457.348		
1	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	128.327.000	39,70	36,46	40.457.348	(3,24)	gaji tenaga teknis pendukung yang akan digeser pada anggaran perubahan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	6.433.000			1.466.500		
1	Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota	6.433.000	46,63	22,80	1.466.500	(23,83)	Efisiensi Perjalanan Dinas. Pendampingan Kab Kebumen dan Kota Pekalongan dilaksanakan di akhir bulan Juni sehingga di-SPJkan bulan Juli.
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	230.490.000			77.346.000		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	230.490.000	34,53	33,56	77.346.000	(0,97)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	26.900.000			6.825.000		
1	Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO	26.900.000	25,37	24,42	6.825.000	(0,95)	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	279.956.000			68.482.000		
1	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	279.956.000	41,24	24,73	68.482.000	(16,51)	kegiatan Gapuro Gayeng dialihkan untuk kegiatan lain yaitu Pesantren Perempuan dan Anak di anggaran perubahan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	31.026.000			11.882.500		
1	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota	14.000.000	30	27,54	3.855.000	(2,46)	

2	Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penjangkauan Penguatan Keluarga	17.026.000	48,93	47,13	8.027.500	(1,80)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	6.732.000			0		
1	Bimbingan Teknis SRA tingkat Provinsi	2.050.000	100	0	0	(100)	kegiatan akan dilaksanakan bulan Juli, menyesuaikan kalender pendidikan sekaligus untuk persiapan forum anak go to school
2	Jejaring Partisipasi Anak secara Inklusif	4.682.000	100	0	0	(100)	keigatan akan dilaksanakan di bulan juli, menjadi rangkaian peringatan hari anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	14.312.000			1.845.000		
1	Optimalisasi Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak	14.312.000	23,75	12,89	1.845.000	(10,86)	RKO bulan Juni berisi perjadin sehingga penggunaannya menyesuaikan kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	295.844.000			40.003.862		
1	Pengembangan Konten Media KIE	95.844.000	46,82	38,39	37.142.862	(8,43)	Karena anggaran gaji non asn yang tadinya 2 orang menjadi 1 orang
2	Percepatan Penurunan Stunting	200.000.000	25	1,52	2.861.000	(23,48)	Menyesuaikan jadwal TPPS Kab/Kota
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan danÃ Anak							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.961.000			4.414.700		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6.961.000	63,88	63,43	4.414.700	(0,45)	

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	17	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Serapan DAK Non-Fisik PPPA pada semester I belum sampai 50% karena adanya pergeseran belanja kegiatan pada boppa pencegahan dan boppa penguatan, sedangkan pada boppa pelayanan realisasi menyesuaikan kebutuhan korban (UPTD);
2. Juknis untuk pemantauan dan evaluasi stunting dari pusat belum terbit (KIE)
3. Hasil Survey SSGI baru rilis di bulan Juni dan masih ada 6 kab/kota yang datanya masih kosong (KIE)

Upaya

1. Koordinasi dengan TPPS Pusat, Provinsi dan kab/kota terkait juknis dan hasil survey SSGI (KIE)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak (UPTD);
2. Talkshow peran DWP dalam pembangunan keluarga (PP);
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanganan KBGO (PP);
4. Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan sebagai Implementasi Serat Kartini (PP);
5. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO (PP);
6. Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan ABH (PA);
7. Penyusunan Rapergub Perlindungan Anak (KLA) (PA);
8. Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Kelompok UPPKA rencana di Kab. Blora (KS);
9. Safari Pelayanan KB MKJP di 4 lokasi (KB);
10. Rakor Percepatan dan Penurunan Stunting di 3 lokasi eks bakorwil (KIE);
11. Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Dalduk);
12. Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting (Dalduk);
13. Jejaring Partisipasi Anak secara Inklusif di LPKA Kutoarjo (PHA);
14. Bimtek SRA (PHA);
15. Ngopi Penak (PHA);
16. Bimbingan Masyarakat Jo Kawin Bocah (PHA);
17. PPEP di 3 lokasi (KG);
18. Dikpol (KG);
19. Bimtek LPLPP Kab/kota via zoom (KG).

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. Semua kegiatan diarahkan untuk mendukung program prioritas Gubernur baru

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juni 2025, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Rabu, 9 Juli 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dra.. EMA RACHMAWATI, M.Hum

NIP. 196605171990082001